



## *The Effect Of Implementation The Prospect Family Program (PKH) Effected The Welfare At Kedondong Raye*

### **Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kedondong Raye**



Inne Miftah Dewi <sup>a</sup>  
Syaparman <sup>b</sup>

#### Article history:

Submitted: 21-05-2025

Revised: 01-06-2025

Accepted: 15-06-2025

#### Keywords:

Effect, Prospect Family Program, Welfare

#### Abstract

Prospect Family Program (PKH) is one of the policies carried out by the government to decrease poverty level in Indonesian. PKH is to increase quality of the poorest family. The research was conducted on people who are members of the Beneficiary Families (KPM) of the Prospect Family Program (PKH) in Kedondong Raye Village, Banyuasin Regency. The purpose of this paper is to determine the effect of the Prospect Family Program on Community Welfare in Kedondong Raye Village, Banyuasin Regency. The research method used is descriptive quantitative with a sample of 44 used purposive sampling technical approach Slovin formula. The method research is to find out the effect of Prospect Family Program variable effected to the welfare used simple regression analysis, partial significance test and the coefficient of determination (R Square). The analysis showed R square was 0.603, which means that the percentage of the prospect Family Program (PKH) variable to welfare was 60.3%. The result of this research how Prospect Family Program effected Positively and significant to welfare At Kedondong Raye Banyuasin without the other variables not included in the regression method.

**Keywords: Effect, Prospect Family Program, Welfare**

#### Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. PKH bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga yang tergolong sangat miskin agar

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang

lebih baik. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan 44 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Untuk menganalisis data, digunakan metode regresi linear sederhana, uji signifikansi parsial (uji t), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,603, yang mengindikasikan bahwa 60,3% variasi kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh signifikan dari Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin

***Kata Kunci: Pengaruh, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan***

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2025.*

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license*

*(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

***Corresponding author:***

Inne Miftah Dewi\*

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang

*Email address:* [inne.miftah@stisipolcandradimuka.ac.id](mailto:inne.miftah@stisipolcandradimuka.ac.id)

## **1Pendahuluan**

Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang, khususnya dalam aspek Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan yang berperan secara signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat (Nafi, 2021). Dampak dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran ini menjadi hal yang penting dalam pembangunan negara. Kemiskinan adalah keterbatasan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, tempat berlindung, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kemiskinan, sebagaimana dijelaskan oleh BPS, terjadi ketika individu maupun rumah tangga mengalami keterbatasan ekonomi yang menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, baik makanan maupun non- makanan berdasarkan garis kemiskinan yang diterapkan. Seseorang dianggap miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan (Statistic Indonesia, 2020). Selama Maret 2022-Maret 2023, garis kemiskinan nasional menunjukkan tren peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 8,90 persen, dari Rp505.469,00 per kapita per bulan pada Maret 2022, menjadi Rp550.458,00 per kapita per bulan pada Maret 2023. Di wilayah perkotaan, peningkatan mencapai 9,17 persen, dan di wilayah perdesaan naik sebesar 8,34 persen (Statistic Indonesia, 2020).

Adanya peningkatan kemiskinan menjadi salah satu hal penyebab tertinggal dan terhambatnya pembangunan suatu bangsa menuju bangsa yang Sejahtera (Mawarni, 2019). Penanggulangan kemiskinan telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga internasional, dalam waktu yang cukup lama. Di Indonesia, masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Ernita et al., n.d.).

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program, terus berusaha mengurangi angka kemiskinan, baik melalui bantuan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap sektor pendidikan dan layanan kesehatan maupun pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Namun, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor

yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Ada banyak faktor lain, seperti ketimpangan sosial, infrastruktur yang terbatas, serta perubahan iklim yang dapat mempengaruhi potensi pembangunan ekonomi.

Upaya ekonomi yang menjamin partisipasi semua pihak serta mempertahankan keberlanjutannya memerlukan perhatian terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat miskin, penyediaan lapangan kerja yang layak, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil orang, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Untuk keluar dari persoalan tersebut pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Program Bantuan tersebut dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial RI (Pekuwali et al., 2017).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdaftar sebagai penerima. Program ini termasuk dalam skema Conditional Cash Transfer (CCT) yang secara internasional dianggap efektif dalam mengatasi kemiskinan. Program ini dirancang untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial

Selain memberikan bantuan dana langsung terhadap Kesehatan dan Pendidikan KPM, PKH juga memberikan bantuan berupa pembelajaran yang dirancang secara sistematis guna mendorong percepatan perubahan perilaku. Pembelajaran ini dikenal dengan nama Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau biasa disebut P2K2. P2K2 diberikan untuk menambah pemahaman pentingnya peran keluarga dalam aspek pengasuhan anak, Pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan rumah tangga, perlindungan anak serta kesejahteraan sosial dalam keluarga, pada akhirnya dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih baik. Melalui P2K2 ini, dapat menciptakan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga dapat terbebas dalam lingkaran kemiskinan secara bertahap.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Banyuwasin terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Banyuwasin sebesar Rp 381.473 per kapita per bulan. Hingga pada tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Banyuwasin menjadi Rp 477.393 per kapita per bulan. (BPS Kabupaten Banyuwasin, 2023). Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwasin telah berhasil ditekan. Garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwasin terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 381.473 per kapita per bulan, dan meningkat menjadi Rp 477.393 per kapita per bulan pada tahun 2022.

Hingga pada tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Banyuwasin mengalami peningkatan menjadi Rp 509,264 per kapita per bulan. Selama periode tahun 2019 hingga 2023, tren presentase kemiskinan di Banyuwasin cenderung fluktuatif namun menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 presentase penduduk miskin tercatat 11,33 persen, yang kemudian menurun menjadi 11,17 persen di tahun 2020, menjadikannya angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan presentase 10,75 persen, kemudian menurun kembali secara bertahap dari 10,00 persen pada tahun 2022 menjadi 9,58 persen di tahun 2023 (BPS Kabupaten Banyuwasin, 2024). Keberhasilan ini juga tidak lepas dari Program Keluarga Harapan, yang pada tahun 2023 tercatat presentase rumah tangga yang menerima dana PKH mencapai 17,00 persen.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwasin. Penerapan PKH di Kabupaten Banyuwasin sendiri dimulai pada tahun 2011. Di Kabupaten Banyuwasin sendiri KPM PKH sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwasin termasuk di Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuwasin III. Kelurahan Kedondong Raye memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kelurahan Pangkalan Balai yaitu tercatat sebesar 8,73 (ribu) dengan laju pertumbuhan sebesar 1,14%. Di Kelurahan Kedondong Raye sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian yaitu karet dan sebagian penduduk bekerja di sektor perdagangan. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dasar tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kedondong Raye”**.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang serta menjalankan berbagai tindakan, pekerjaan, atau kepemimpinan. Kebijakan ini dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta, maupun individu. Sementara itu, kata "publik" dalam KBBI mengacu pada masyarakat luas atau khalayak banyak.

Robert Eyestone memberikan salah satu pengertian tentang Kebijakan Publik (1971:18). Menurutnya, kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai "interaksi antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya" (Mustari, 2015)

Menurut Dye, kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik tindakan yang dijalankan maupun yang tidak dijalankan. Artinya, kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil pemerintah, bukan hanya pernyataan atau keinginan semata. Jika pemerintah memutuskan untuk bertindak, tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan melibatkan seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah, bukan hanya sekedar ide atau rencana dari para pejabatnya (Tahir, 2017)

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disampaikan, Kebijakan publik erupakan kumpulan tindakan yang dirancang untuk menangani permasalahan tertentu di suatu daerah atau negara, yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan setempat. Secara umum, kebijakan publik diarahkan pada tindakan yang memiliki tujuan atau maksud yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan umumnya dirumuskan dalam wujud peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan pelaksanaannya oleh pihak terkait.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan publik diungkapkan oleh Nugraho (2008:494) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa lebih atau kurang. Van Mater dan Van Horn, sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2001:192), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah dan juga entitas swasta, yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut (Pekuwali et al., 2017).

Model pelaksanaan kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III menggunakan pendekatan top-down. Edward III menyebut pendekatan ini sebagai *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam kerangka tersebut, ia mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

### **Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran (Nafi, 2021). BAPPENAS memandang kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan yang tidak mampu diatasi dengan kemampuan yang dimilikinya. Definisi ini sejalan dengan pandangan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merujuk pada kriteria kemiskinan menurut Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, seseorang atau keluarga dikategorikan miskin apabila memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, antara lain:

1. Tidak memiliki sumber penghasilan atau memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana.
3. Kesulitan mengakses layanan kesehatan medis selain puskesmas atau fasilitas yang disubsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian minimal sekali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga.
5. Hanya mampu menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.
6. Memiliki kondisi dinding rumah yang terbuat dari bambu, kayu, atau tembok dengan kualitas rendah atau sudah rusak.
7. Lantai rumah terbuat dari tanah, kayu, semen, atau keramik dengan kondisi yang buruk.
8. Atap rumah menggunakan bahan ijuk, rumbia, genteng, seng, atau asbes yang kualitasnya rendah.
9. Penerangan rumah tidak berasal dari listrik atau menggunakan listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi per orang.
11. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, air sungai, air hujan, dan sejenisnya.

### **Penyebab dan Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya angka pengangguran, kondisi kesehatan yang buruk, keterbatasan fisik atau cacat, serta masalah emosional. Selain itu, perkembangan mental yang terlambat, tingginya biaya perawatan kesehatan, serta ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan juga turut berkontribusi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah besarnya jumlah anggota keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, ketidaksesuaian antara pekerjaan dan kemampuan, serta kurangnya keterampilan kerja. Kondisi keluarga yang dipimpin oleh perempuan dengan anak kecil, tidak adanya sumber pendapatan tambahan, diskriminasi rasial, serta stigma negatif seperti dianggap eks-napi atau mengalami gangguan jiwa juga memperparah situasi. Lingkungan tempat tinggal yang minim peluang kerja, perceraian, ditinggal pasangan, sikap enggan bekerja, pengangguran, pekerjaan bergaji rendah, dan usia lanjut juga menjadi penyebab kemiskinan (Kadji, 2004).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang difokuskan pada pelaksanaan program dan aktivitas yang bertujuan membantu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang kekurangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan dengan sumber penghasilan yang tersedia. Penanggulangan ini mencakup berbagai bentuk, antara lain penyuluhan dan pendampingan sosial, layanan sosial, pemberian akses terhadap peluang kerja dan wirausaha, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, penyediaan perumahan serta pemukiman, serta fasilitasi pelatihan, modal usaha, dan pemasaran produk hasil usaha.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Melalui program ini, keluarga miskin—terutama ibu hamil dan anak-anak—diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, PKH juga mulai memperluas cakupannya dengan memasukkan kelompok penyandang disabilitas dan lansia guna menjaga kesejahteraan sosial mereka, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia (Pekuwali et al., 2017).

Melalui pelaksanaan PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memanfaatkan layanan dasar sosial seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, mereka juga mendapatkan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lain yang berjalan secara berkesinambungan sebagai program pendukung (Andika, 2021). PKH diarahkan untuk menjadi pusat unggulan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Beberapa tujuan utama Program Keluarga Harapan menurut Permensos (2018), sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban biaya keluarga miskin dan rentan serta meningkatkan pendapatan mereka.
3. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
5. Memperkenalkan berbagai produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat

PKH sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan landasan hukum yang jelas. Pada tahun 2018, Kementerian Sosial mengeluarkan regulasi terbaru terkait pelaksanaan PKH, yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 8 Januari 2018 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187 pada tanggal 29 Januari 2018.

## Besaran Bantuan PKH

Skema bantuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (per tahap) Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Indeks Dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial PKH Tahun 2021 (Rp)/Tahun**

No	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/3 bulan Rp.
1	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000
3	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
6	Disabilitas berat	2.400.000	600.000
7	Lanjut Usia 70 tahun ke atas	2.400.000	600.000

Sumber: *pkh.kemensos.go.id*

Bantuan sosial yang diperoleh oleh peserta PKH ini, digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha, serta keperluan lain yang mendukung pencapaian tujuan program (*Pedoman Pelaksanaan PKH: 2021*).

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedondong Raye dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Kedondong Raye dengan jumlah 80 KK penerima PKH. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini, maka digunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

$\alpha$  = Standar Error 10%

Berdasarkan rumus diatas maka, jumlah sampel yang diperlukan sebagai berikut:

$$n = \frac{80}{1 + 80(0,1)^2}$$

$$n = \frac{80}{1,8}$$

$$n = 44$$

Penelitian ini, data primer diperoleh dari responden Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kedondong Raye melalui metode penyebaran kuesioner. Sebelum pengumpulan data, kuesioner diuji validitasnya dengan korelasi antara nilai r hitung dan r tabel, serta diuji reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha. Dari hasil uji validitas, diperoleh nilai r hitung yang lebih tinggi dibandingkan nilai r tabel sebesar (0,810), yang menandakan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner berkorelasi dengan skor total dan data yang diperoleh dapat diterima untuk analisis lebih lanjut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan uji prasyarat analisis, seperti uji normalitas dan linearitas, analisis regresi linear sederhana diterapkan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t parsial serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan bantuan perangkat analisis SPSS versi 26.0

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin. Setelah data terkumpul melalui penyebaran kuesioner kepada para responden, langkah selanjutnya adalah melakukan uji prasyarat analisis berupa uji normalitas dan uji linearitas.. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual dari dua variabel yaitu Program keluarga Harapan dan Kesejahteraan Masyarakat, memiliki distribusi normal dengan nilai Signifikasi sebesar 0,020 lebih besar dari 0,05.

Penelitian ini, analisis data serta pengujian hipotesis dilaksanakan dengan metode regresi linier sederhana, uji signifikansi parsial (uji t), dan penghitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Semua analisis dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Hasil uji regresi sederhana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>		Stand		ardized		Coefficients		t		Sig.		S	
Model		Beta											
1	(C	1						2				0	
	onstant)	3.061	.159			.532				.015			
	PK	1				0.776		7				0	
	H	.325	.166			.984				.000			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Dari table diatas, dapat diambil persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 13.061 + 1.325 X$$

Konstanta sebesar 13,061 mengindikasikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedondong Raye. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (X) berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan analisis uji hipotesis melalui uji signifikansi parsial (uji t) dan koefisien determinasi. Uji t parsial berfungsi untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara terpisah. Apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,1, maka variabel tersebut dianggap memiliki dampak yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi melebihi 0,1, pengaruh variabel tersebut dianggap tidak signifikan..

Tabel 3 Hasil Uji signifikansi parsial (uji t)

Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients		t		Sig.	
Model	Constant	Beta					
1	(Constant)	13.061	.159	7.984	.015		
	PKH	13.325	.166	7.984	.000		

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan data pada tabel, nilai signifikansi untuk variabel X, Program Keluarga Harapan, tercatat sebesar 0,000, yang berarti lebih rendah dari angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien yang diperoleh sebesar 13,061 dengan nilai positif, menunjukkan adanya pengaruh positif. Selain itu, nilai t-hitung sebesar 7,984 yang melebihi t-tabel sebesar 1,325 memperkuat bukti bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kesimpulannya, Program Keluarga Harapan memiliki efek yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen, yaitu Program Keluarga Harapan, mampu menjelaskan variabel dependen, yakni kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang tercantum pada tabel ringkasan model, nilai korelasi ( $R$ ) tercatat sebesar 0,776. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh adalah 0,603, yang mengindikasikan bahwa sekitar 60,3% variasi dalam kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel Program Keluarga Harapan. Rincian hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) disajikan pada tabel berikut..

Tabel 4 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>		R		Adjusted R Square		Std. Error of the Estimate	
Model	R Square	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate			
1	.776 <sup>a</sup>	.881	.593	13.325			3

a. Predictors: (Constant), PKH

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Penelitian ini dilakukan untuk menilai dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedondong Raya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 44 keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat PKH pada tahun 2023. Kuesioner ini terdiri dari lima kategori responden dan mencakup berbagai variabel yang memengaruhi pelaksanaan program, seperti identitas demografis (usia, jenis kelamin, pekerjaan), jenis bantuan PKH yang diperoleh, serta lama waktu keluarga menjadi bagian dari program tersebut.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS versi 26, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,1, serta koefisien sebesar 1,325%. Nilai konstanta sebesar 13,061 menunjukkan bahwa keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedondong Raya. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi melebihi 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa PKH tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, koefisien yang bernilai positif mengindikasikan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai t hitung sebesar 7,984 yang melampaui nilai t tabel yaitu 1,325, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PKH (X) secara signifikan memengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Pengaruh PKH terhadap kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,776 dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 60,3% variasi dalam kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaan PKH, sementara 39,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil analisis dengan metode regresi linier sederhana, ditemukan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, serta nilai t hitung sebesar 7,984 yang lebih tinggi dari t tabel 1,325. Persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah  $Y = 13,061 + 1,325X$ , yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam variabel PKH berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Program Keluarga Harapan terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin.

## 5. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–55. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227>
- BPS Kabupaten Banyuasin. (2023). *Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin 2023*. xvi + 130 Halaman. <https://banyuasinkab.bps.go.id/>
- BPS Kabupaten Banyuasin. (2024). INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BANYUASIN 2024. *Badan Pusat Statistik*, 6, xiv + 102 Halaman. <https://banyuasinkab.bps.go.id/>
- Ernita, T., Handayani, R., Hasbiyah, S., Studi, P., & Publik, A. (n.d.). *PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TELUK BULUH*. 509–519.
- Kadji, Y. (2004). KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG Abstrak*, 30(8).
- Mawarni, K. S. (2019). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dea Ciomas Kecamatan Panjalau Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 56–66.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nafi, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ( 2016-2019 ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 953–960.
- Pekuwali, P., Indartuti, E., & Zakariya, Z. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan (Studi Di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 864–886. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1267>
- Statistic Indonesia. (2020). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. *Badan Pusat Statistik*, 2021, 1–90. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2019.html>
- Tahir, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual*. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/2056%0Ahttps://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/2056/684>